

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI PELAPORAN
KEUANGAN DI INTERNET SECARA
SUKARELA OLEH PEMERINTAH DAERAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

YURISCA FEBRIYANTY SINAGA
C2C007142

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2011

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Yurisca Febriyanty Sinaga

Nomor Induk Mahasiswa : C2C007142

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI
PELAPORAN KEUANGAN DI
INTERNET SECARA SUKARELA
OLEH PEMERINTAH DAERAH**

Dosen Pembimbing : Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, S.E., M.Si, Akt.

Semarang, 12 Mei 2011

Dosen Pembimbing,

Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, S.E., M.Si,
Akt.
NIP 19711026 200003 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Yurisca Febriyanty Sinaga
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007142
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI
PELAPORAN KEUANGAN DI
INTERNET SECARA
SUKARELA OLEH
PEMERINTAH DAERAH**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 6 Juni 2011

Tim Penguji

1. Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, S.E., M.Si, Akt. (.....)
2. Dr. Etna Nur Afri Y., M.Si, Akt. (.....)
3. Drs. Dul Muid, M.Si, Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Yurisca Febriyanty Sinaga, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 12 Mei 2011

Yang membuat pernyataan,

Yurisca Febriyanty Sinaga
C2C007142

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah
Kau berikan ku kekuatan untuk mendakinya
ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya
Tuhan selalu punya cara
membuat ku menang pada akhirnya.

(potongan lirik lagu "Tuhan Selalu Punya Cara")

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Papa dan Mama, semoga dapat membuat kalian tersenyum bahagia

Almamaterku, semoga dapat menjadi literatur yang bermanfaat

ABSTRACT

The aim of this research is to examine factors which predicted will influence voluntary internet financial reporting by local government. Factors which are going to be tested are political competition, size, leverage, wealth, and type of local government.

The population of this research are local governments of Indonesia. The number of samples is 85, calculated using Slovin calculation formula. Analysis method used to test hypothesis in this research is logistic regression.

The result of this study indicates that regency government type significantly has negative influence to voluntary internet financial reporting by local government. This is due to regency government, as the location where urbanization is come from, exists a lower rate of monitoring action as the result of the low amount of voter coalition formed, as well as the lower rate of internet acces and usage. It indicates that local government tends to not engage internet financial reporting if the population is low. The other factors, such like political competition, size, leverage, wealth, do not influence voluntary internet financial reporting by local government significantly.

Key words : internet financial reporting, voluntary, local government, political competition, size, leverage, wealth, regency government type

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang diprediksi mempengaruhi pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah kompetisi politik, ukuran, *leverage*, kekayaan pemerintahan daerah, serta tipe pemerintahan daerah.

Populasi dari penelitian ini adalah pemerintahan daerah Indonesia. Jumlah sampel sebanyak 85 diperoleh berdasarkan formula perhitungan Slovin. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini ialah regresi logistik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tipe pemerintahan kabupaten secara signifikan berpengaruh negatif terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pada pemerintahan kabupaten, sebagai daerah asal urbanisasi, terdapat lebih sedikit pengawasan akibat sedikitnya koalisi pemilih yang terbentuk, serta tingkat penggunaan dan akses internet yang juga lebih rendah. Sedangkan faktor-faktor lainnya, yaitu kompetisi politik, ukuran, *leverage*, dan kekayaan pemerintahan daerah, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah.

Kata kunci : pelaporan keuangan di internet, sukarela, pemerintah daerah, kompetisi politik, ukuran, *leverage*, kekayaan, tipe pemerintahan kabupaten

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan kasih dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAPORAN KEUANGAN DI INTERNET SECARA SUKARELA OLEH PEMERINTAH DAERAH”**.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, saran, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Bapak Tri Jatmiko Wahyu Pabowo, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing atas setiap bimbingan, petunjuk, dan waktu yang telah diluangkan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
3. Ibu Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, M.Si., Akt. dan Bapak Dul Muid, M.Si., Akt. selaku dosen penguji yang telah memberikan pengetahuan dan masukan guna perbaikan skripsi ini.
4. Bapak Surya Rahardja, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen wali atas bimbingan dan saran yang telah diberikan selama penulis menempuh kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
5. Segenap dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro untuk ilmu

bermanfaat yang telah diajarkan.

6. Seluruh staf tata usaha dan perpustakaan Universitas Diponegoro atas segala bantuan selama penulis menempuh kuliah.
7. Mbak Rikha Handayani, Staf Sub Bagian Layanan Informasi BPK RI; Mbak Riyani Indriastuti, Kasubbag. Perpustakaan dan Media Center KPU RI; serta petugas BPS yang telah membantu kelancaran penulis dalam pemerolehan data.
8. Bapak Drs. Dodi Riyatmadji, M.M., Direktur Fasilitas Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga, Ditjen Otda Kemdagri, yang telah memberikan gambaran dan komentar kepada penulis mengenai skripsi ini.
9. Papa, Mama, Abang Andri, Adek Aldo, Adek Cintya yang sangat penulis kasihi serta segenap keluarga lainnya atas doa, nasihat, sumbangan pikiran, dukungan dan setiap wujud kasih yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga komcil penulis : Kak Oktamina, Grace Nehemia, Maida Mutiara, Sevrida Verawaty, juga adik-adikku Dwi Hayu, Gloria A., Maria Melinda, dan Oktaviana Nicolin atas doa, perhatian, teguran, dukungan, inspirasi, dan kebersamaan yang sangat membantu penulis untuk berjuang dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Martina Eny dan Murni Ana atas ketulusan doa, dukungan, perhatian, diskusi, dan inspirasi untuk tetap berjuang melakukan yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini guna meraih masa depan yang lebih cerah.

12. Saudara-saudara dalam Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) Fakultas Ekonomi UNDIP, untuk doa, dukungan, dan semangat yang diberikan. Termasuk Arif, Lidya, Devi, dan Ferry yang telah memberi gambaran dan informasi tentang data salah satu variabel dalam skripsi ini.
13. Teman-teman Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNDIP angkatan 2007, terkhusus Nike Nur Aini, Siska Kusumaningrum, juga Patralia Adityawati atas penjelasan mengenai alat statistik yang dipakai dalam skripsi ini. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan.
14. Teman-teman KKN Kebonagung “HOH” : Benny, Indah, Grace, Diani, Fahmi, Bagus, Tika, Roiyana, Mas Kamal, Fuji, Ashari, dan Hana atas dukungan dan kebersamaan yang diberikan.
15. Teman-teman kos atas bantuan dan semangat yang diberikan.
16. Pihak-pihak lain yang telah membantu penyelesaian skripsi.

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi lingkungan pemerintahan daerah Indonesia serta penelitian selanjutnya sekalipun penulis juga menyadari bahwa penelitian ini hanyalah titik kecil dari luasnya literatur dan ilmu pengetahuan di bidang sektor publik. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan penelitian ini.

Semarang, 12 Mei 2011

Penulis,

Yurisca Febriyanty Sinaga

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1.3.1 Tujuan Penelitian	13
1.3.2 Kegunaan Penelitian	13
1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II TELAAH PUSTAKA	16
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	16
2.1.1 Landasan Teori	16

2.1.1.1	Pemerintahan Daerah di Indonesia	16
2.1.1.2	Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	18
2.1.1.2.1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	20
2.1.1.2.2	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	22
2.1.1.2.3	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).....	25
2.1.1.3	Manfaat Pelaporan Keuangan di Internet	27
2.1.1.4	Teori Legitimasi	28
2.1.1.5	Teori Stakeholder	31
2.1.2	Penelitian Terdahulu.....	32
2.2	Kerangka Pemikiran	35
2.3	Hipotesis	39
2.3.1	Pengaruh Kompetisi Politik terhadap Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah	39
2.3.2	Pengaruh Ukuran Pemerintahan Daerah terhadap Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah	40
2.3.3	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah	41

2.3.4	Pengaruh Kekayaan Pemerintahan Daerah terhadap Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah	42
2.3.5	Pengaruh Tipe Pemerintahan Daerah terhadap Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah	43
BAB III METODE PENELITIAN		45
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	45
3.1.1	Variabel Penelitian	45
3.1.1.1	Variabel Terikat	45
3.1.1.1	Variabel Bebas.....	45
3.1.2	Definisi Operasional	46
3.1.2.1	Kompetisi Politik	46
3.1.2.2	Ukuran Pemerintahan Daerah	46
3.1.2.3	<i>Leverage</i>	47
3.1.2.4	Kekayaan Pemerintahan Daerah	47
3.1.2.5	Tipe Pemerintahan Daerah	47
3.1.2.6	Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah	48
3.2	Populasi dan Sampel	49
3.3	Jenis dan Sumber Data	50
3.4	Metode Pengumpulan Data	51
3.5	Metode Analisis	51

3.5.1	Analisis Deskriptif	51
3.5.2	Uji Hipotesis	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		56
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	56
4.2	Analisis Data	62
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif	62
4.2.2	Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian.....	67
4.2.2.1	Menguji Kelayakan Model Regresi	67
4.2.2.2	Menilai Keseluruhan Model (<i>Overall Model Fit</i>)	67
4.2.2.3	Koefisien Determinasi (<i>Nagelkerke R Square</i>)	68
4.2.2.4	Uji Multikolinearitas	69
4.2.2.5	Matiks Klasifikasi.....	69
4.2.2.6	Menguji Koefisien Regresi	70
4.3	Interpretasi Hasil	72
4.3.1	Pengaruh Kompetisi Politik terhadap Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah	72
4.3.2	Pengaruh Ukuran Pemerintahan Daerah terhadap Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah	74
4.3.3	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah	75

4.3.4	Pengaruh Kekayaan Pemerintahan Daerah terhadap Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah	77
4.3.5	Pengaruh Tipe Pemerintah Kabupaten terhadap Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah	78
BAB V	PENUTUP	80
5.1	Simpulan	80
5.2	Keterbatasan	82
5.3	Saran	82
	DAFTAR PUSTAKA	84
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 4.1 Jumlah Pemerintahan Daerah di Indonesia.....	56
Tabel 4.2 Sampel Penelitian.....	59
Tabel 4.3 Rincian Informasi Keuangan Kategori IFRA	61
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Variabel POLCOMPT, SIZE, LEV, WEALTH secara Keseluruhan.....	63
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Variabel POLCOMPT, SIZE, LEV, WEALTH untuk IFRA	63
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Variabel POLCOMPT, SIZE, LEV, WEALTH untuk N-IRFA.....	63
Tabel 4.7 Frekuensi Variabel COUNTYPE.....	66
Tabel 4.8 Menguji Kelayakan Model Regresi	67
Tabel 4.9 Menilai Keseluruhan Model.....	67
Tabel 4.10 Koefisien Determinasi.....	68
Tabel 4.11 Uji Multikolinearitas.....	69
Tabel 4.12 Matriks Klasifikasi.....	69
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik.....	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	38

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Tabulasi Data	86
Lampiran B Output SPSS	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi sektor publik di Indonesia didefinisikan sebagai organisasi yang menggunakan dana masyarakat (Bastian, 2006). Karakteristik dari organisasi sektor publik ialah memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya, melalui aktivitas pelayanan publik yang didanai dari dana masyarakat, pinjaman, dan pendapatan lain-lain yang sah. Pemerintahan daerah merupakan bagian dari organisasi sektor publik. Jones dan Pendlebury (2000) menggolongkan pemerintahan daerah (*local government*) dalam kategori *type B non-profit*, yaitu organisasi non-laba yang memperoleh sumber daya finansial dalam jumlah signifikan dari sumber selain penjualan barang dan jasa.

Sebelum membahas lebih dalam mengenai pemerintahan daerah di Indonesia perlu diketahui tentang ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan daerah di Indonesia yang menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan (Kawedar dkk, 2008). Pemerintahan daerah di Indonesia dibagi menjadi tiga lingkup pemerintahan. Masing-masing lingkup pemerintahan, yaitu pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, dan pemerintahan kabupaten, dipimpin oleh kepala daerah yang disebut gubernur, walikota, dan bupati. Lingkup pemerintahan tersebut dapat juga disebut tipe pemerintahan. Kepala daerah dipilih

oleh rakyat melalui suatu proses pemilihan. Dengan kata lain, rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada kepala daerah.

Dalam lingkungan keuangan pemerintahan, kepala daerah memegang amanat rakyat untuk menyusun, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan anggaran. Sebagian pendapatan dalam anggaran tersebut bersumber dari dana rakyat, yaitu pembayaran pajak dan retribusi. Pendapatan dari dana rakyat dan sumber-sumber lainnya itulah yang harus dikelola kepala daerah dengan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Kepala daerah harus mengupayakan terciptanya keseimbangan antara kemampuan memperoleh pendapatan dengan pengeluaran guna memenuhi kebutuhan rakyat. Keseimbangan tersebut dapat terlihat dari berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa kepala daerah memegang peranan penting dalam mengelola keuangan daerah. Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditegaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sehubungan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang baik oleh kepala daerah seperti yang disebutkan pada UU RI Nomor 17 Tahun 2003, diperlukan motivasi yang benar dan kejujuran dari kepala daerah dalam menjalankan amanat mengelola keuangan daerah dengan baik. Kierkegaard (2009) dalam Bertot, dkk (2010) menyatakan bahwa "*transparency ultimately*

serves to keep government honest—good government must be seen to be done”.

Suatu pemerintahan daerah dengan kepala daerah yang menjunjung transparansi dapat dilihat dari ada atau tidaknya informasi keuangan yang tersedia secara terbuka bagi masyarakat dan pengguna lainnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, transparansi dapat menjadi indikator adanya kelola keuangan yang baik.

Perhatian terhadap isu transparansi di Indonesia semakin meningkat dalam satu dekade terakhir ini. Salah satu indikatornya ialah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Menurut Mulyana (2006), faktor yang menyebabkan isu transparansi keuangan daerah semakin meningkat ialah krisis ekonomi yang telah memberi kontribusi terhadap erosi substansial kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Ditambah lagi desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Salah satu bentuk transparansi yang dapat ditempuh kepala daerah ialah dengan mengungkapkan laporan keuangan pemerintah daerah secara sukarela di internet sehingga seluruh *stakeholder* memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi yang ada di lingkungan pemerintahan daerah. Menurut Bertot, dkk (2010), kesempatan untuk mengakses informasi tentang pemerintah, seperti yang

dapat dilakukan dalam pengungkapan sukarela laporan keuangan di internet, sekarang ini perlu diperhatikan untuk menjamin partisipasi demokrasi, kepercayaan kepada pemerintah, mencegah korupsi, menginformasikan keputusan, akurasi informasi pemerintah, ketersediaan informasi bagi publik, perusahaan, dan jurnalis.

Selain peranan dari pihak internal pemerintahan daerah, diperlukan juga peranan dari pihak eksternal dalam bentuk dukungan dan pengawasan untuk menjamin penyelenggaraan kelola keuangan daerah yang baik. Pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak akan mengarahkan kepala daerah untuk bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada kepala daerah dalam rangka mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat. Suatu pemerintahan daerah yang memiliki pertanggungjawaban yang baik berarti menjalankan prinsip akuntabilitas.

Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang wajib dilakukan oleh kepala daerah ialah menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun menurut standar akuntansi pemerintahan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31 mengatur ketentuan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Gubernur/bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan

daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebelumnya, laporan keuangan disampaikan terlebih dahulu kepada BPK selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai keuangan daerah dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara; serta Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Akan tetapi, tidak ada suatu peraturan pun yang menentukan media yang digunakan untuk pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Kepala daerah dapat menggunakan internet untuk mengungkapkan pertanggungjawaban secara sukarela sebagai upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas. Beberapa sumber menyatakan internet memiliki beberapa manfaat apabila dijadikan media pelaporan keuangan. Menurut Bertot, dkk (2010), teknologi informasi dan komunikasi, misalnya penggunaan internet, terus mengalami kemajuan sehingga dapat menciptakan budaya transparansi yang juga akan mewujudkan akuntabilitas. Pengungkapan sukarela laporan keuangan pemerintah daerah di internet dinilai efisien (Woldenberg, 2004 dalam Bertot, dkk 2010) dan efektif meningkatkan pengendalian terhadap perangkat pemerintahan daerah dari tindakan korupsi serta dapat meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas pemerintahan daerah (Shim dan Eom, 2008 dalam Bertot, dkk 2010). Internet dinilai dapat menjadi jawaban atas harapan masyarakat akan terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Namun demikian, hanya ada beberapa pemerintahan daerah yang secara sukarela memilih untuk mengambil manfaat dari internet sebagai media dalam melakukan pelaporan keuangan. Penting untuk mengidentifikasi pemerintahan daerah yang melakukan pengungkapan pelaporan keuangan di internet secara sukarela serta menguji karakteristik-karakteristik tertentu yang mempengaruhi. Dengan demikian, dapat dianalisis alasan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan melakukan atau tidak melakukan pelaporan keuangan di internet secara sukarela berhubung internet dinilai dapat digunakan sebagai media efektif dan efisien dalam pelaporan keuangan yang dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat akan terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Penelitian yang menguji faktor-faktor yang menentukan pelaporan keuangan telah banyak dilakukan, namun umumnya penelitian tersebut dilakukan di sektor swasta. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Laswad, dkk (2005) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menentukan sejumlah pengungkapan di sektor publik belum banyak diteliti. Pernyataan senada juga diungkapkan Styles dan Tennyson (2007) bahwa hanya ada sedikit penelitian tentang institusi pemerintahan. Hal yang mirip juga terjadi di Indonesia. Penelitian tentang pengungkapan di sektor publik Indonesia terbilang relatif sedikit, beberapa diantaranya ialah penelitian Mulyana (2006) yang memeriksa penyajian neraca dan

aksesibilitas laporan keuangan serta penelitian Lesmana (2010) yang memeriksa karakteristik pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan wajib. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang pengungkapan pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah Indonesia.

Sejumlah literatur, seperti penelitian yang dilakukan oleh Laswad, dkk (2005), menunjukkan bahwa terdapat beberapa variabel yang menentukan pengungkapan sukarela di sektor publik. Hasil penelitian Laswad, dkk (2005) sendiri menunjukkan bahwa *leverage*, kekayaan daerah, visibilitas pers memiliki hubungan positif dengan pelaporan keuangan di internet secara sukarela, serta tipe pemerintahan *district councils* memiliki hubungan negatif dengan pelaporan keuangan di internet secara sukarela. Hasil penelitian Styles dan Tennyson (2007) menunjukkan bahwa aksesibilitas data keuangan di internet secara positif berhubungan dengan jumlah penduduk, pendapatan perkapita penduduk, tingkat utang, serta posisi keuangan kota. Dalam penelitian ini, karakteristik yang akan diuji ialah kompetisi politik, ukuran pemerintahan daerah, *leverage*, kekayaan pemerintahan daerah, dan tipe pemerintahan daerah.

Pemerintahan daerah yang memiliki kompetisi politik yang tinggi memiliki kecenderungan menyediakan informasi (Baber, 1983 dalam Laswad, dkk 2005). Hal yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian Ingram (1984), Evans dan Patton (1987), Giroux (1989). Suatu pemerintahan daerah yang memiliki kompetisi politik yang tinggi ditunjukkan dengan banyaknya kandidat yang memperebutkan suatu posisi sebagai kepala daerah. Baber (1983) dan Evans and

Patton (1987) dalam Laswad, dkk (2005) menyatakan bahwa kepala daerah terpilih dari suatu pemerintahan daerah yang berkompetisi politik tinggi menanggung biaya jangka panjang yang tinggi pula dalam hal pemenuhan janji-janji sebelum pemilihan. Kepala daerah terpilih juga menanggung biaya pengawasan (*monitoring cost*) yang lebih besar dikarenakan lebih banyak pihak yang mengawasinya. Internet dinilai sebagai media penyebaran informasi yang berbiaya efektif, simultan, dan cepat.

Lebih lanjut Baber dan Sen (1984) dalam Laswad, dkk (2005) menyatakan kepala daerah terpilih dari suatu pemerintahan daerah yang berkompetisi politik tinggi lebih rentan terhadap klaim atau kritikan saingan politiknya. Umumnya klaim tersebut mengenai manajemen yang tidak bertanggung jawab. Dengan begitu, kepala daerah terpilih akan cenderung menggunakan metode pelaporan yang diterima untuk menunjukkan komitmen manajemen yang efisien.

Ada bukti bahwa penggunaan internet untuk pelaporan keuangan dengan cepat akan menjadi norma di sektor swasta internasional. Securities and Exchange Commission (SEC) menyatakan karena investor memiliki akses dan menggunakan internet, komisi akan mempertimbangkan penggunaan internet sebagai alat penyebaran informasi yang utama (SEC, 2001 dalam Laswad, dkk 2005). Dengan demikian, penggunaan internet untuk pelaporan keuangan secara sukarela oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia merupakan upaya untuk menunjukkan kepatuhan pelaporan dengan metode yang terbaik.

Ukuran pemerintahan daerah dapat dilihat dari aset yang dimiliki pemerintahan daerah tersebut. Semakin besar aset menandakan jumlah transfer

kekayaan yang dikelola oleh perangkat pemerintahan daerah semakin besar pula. Jumlah transfer kekayaan yang dikelola oleh perangkat pemerintahan daerah dapat meningkatkan kompetisi politik untuk suatu jabatan di sektor publik. Hal ini menyebabkan pemegang jabatan menanggung biaya pemantauan yang lebih besar sehubungan dengan janji sebelum pemilihan mereka (Baber, 1983 dalam Laswad, dkk 2005). Penelitian Baber (1983), Ingram dan DeJong (1987), dan Christiaens (1999) menunjukkan adanya hubungan signifikan antara ukuran dengan tindakan pemantauan. Mengingat kebutuhan untuk pengungkapan yang lebih besar oleh ukuran pemerintahan daerah yang besar, diharapkan pemerintahan daerah tersebut akan cenderung menggunakan berbagai metode pengungkapan. Internet cenderung menjadi sarana sangat efisien dalam pengungkapan sukarela untuk pemerintahan daerah berukuran besar (Ettredge, dkk 2002; Pirchegger dan Wagenhofer, 1999 dalam Laswad, dkk 2005).

Leverage menunjukkan jumlah bagian aset yang dibiayai oleh utang. Penggunaan utang menimbulkan biaya utang (*cost of debt*). Kepala daerah memiliki kecenderungan untuk mengurangi biaya utang. Hal ini dapat dicapai melalui pengungkapan informasi secara sukarela yang memfasilitasi pemantauan oleh kreditur (Zimmerman, 1977; Baber, 1983; Baber dan Sen, 1984; Ingram, 1984; Ingram dan DeJong, 1987; Christiaens, 1999; Gore, 2004 dalam Laswad, dkk 2005). Pengungkapan tersebut dapat disediakan dalam laporan keuangan *hard copy* dan media lainnya, seperti laporan keuangan internet. Penelitian yang dilakukan Laswad, dkk (2005) dan Styles dan Tennyson (2007) menunjukkan

adanya hubungan positif antara *leverage* dengan pengungkapan sukarela laporan keuangan di internet.

Pemerintahan daerah yang memiliki kekayaan yang besar memberi sinyal bahwa manajemen pemerintahan daerah tersebut memiliki kualitas yang baik. Hal itu dapat dijadikan peluang oleh kepala daerah untuk meningkatkan kesempatannya dipilih kembali dalam pemilihan selanjutnya (Christiaens, 1999 dalam Laswad, dkk 2005). Kepala daerah akan menyediakan teknik pengungkapan sukarela, seperti pelaporan keuangan internet, untuk menunjukkan kualitas manajemen yang baik yang telah diraih. Penelitian yang dilakukan Laswad, dkk (2005) serta Styles dan Tennyson (2007) menunjukkan adanya hubungan positif antara kekayaan pemerintahan daerah dengan pengungkapan sukarela laporan keuangan di internet.

Tipe pemerintahan, yaitu pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, dan pemerintahan kabupaten, memiliki komposisi penduduk yang beragam. Penduduk di pemerintahan kabupaten umumnya melakukan urbanisasi sehingga populasi penduduk di pemerintahan kabupaten lebih homogen dibandingkan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kota. Menurut Ingram, (1984) dalam Laswad, dkk (2005) urbanisasi memfasilitasi pembentukan koalisi, yaitu kumpulan pemilih, sehingga kepala daerah memiliki dorongan yang lebih besar untuk secara sukarela memberikan informasi guna pemantauan secara proporsional dengan wilayah metropolitan yang memiliki populasi penduduk yang besar dibanding dengan wilayah pedesaan yang memiliki jumlah penduduk relatif besar. Ditambah lagi, berdasarkan Laporan Kesenjangan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi di

Amerika (Juli, 1999) yang dikeluarkan oleh Administrasi Informasi dan Telekomunikasi Nasional setempat, yang dikutip dalam Laswad dkk, (2005), didapat fakta bahwa pemakaian dan akses internet di daerah tujuan urbanisasi lebih tinggi. Hal tersebut memungkinkan bahwa pelaporan keuangan di internet secara sukarela akan lebih banyak dipraktikkan di pemerintahan provinsi dan pemerintahan kota dibanding pemerintahan kabupaten. Beberapa penelitian juga telah menguji hubungan antara tipe pemerintahan daerah dan insentif pemantauan, misalnya penelitian Zimmerman (1977), Evans dan Patton (1987), Ingram dan DeJong (1987), Giroux (1989). Secara umum, penelitian-penelitian ini menunjukkan hubungan yang signifikan antara tipe pemerintahan daerah dan pilihan pengungkapan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Laswad, dkk (2005) di Selandia Baru. Pada penelitian sebelumnya, digunakan enam variabel independen, yaitu kompetisi politik, ukuran pemerintahan daerah, *leverage*, kekayaan pemerintahan daerah, visibilitas pers, dan tipe pemerintahan daerah. Populasi yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah pemerintahan daerah di Selandia Baru.

Ada dua perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan pertama terdapat pada populasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pemerintahan daerah di Indonesia. Perbedaan kedua ialah variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya lima, yaitu kompetisi politik, ukuran pemerintahan daerah, *leverage*, kekayaan pemerintahan daerah, dan tipe pemerintahan daerah. Variabel visibilitas pers tidak digunakan karena tingkat

kesulitan mendapatkan data tergolong tinggi. Variabel visibilitas pers diukur dari jumlah berita tentang pemerintahan daerah yang muncul pada media massa daerah setempat.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, peneliti mengambil judul penelitian “Analisis Faktor–faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah”.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kompetisi politik mempunyai pengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah ?
2. Apakah ukuran pemerintahan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah?
3. Apakah *leverage* mempunyai pengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah?
4. Apakah kekayaan pemerintahan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah?
5. Apakah tipe pemerintahan kabupaten mempunyai pengaruh negatif terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh positif faktor kompetisi politik, ukuran, *leverage*, kekayaan pemerintahan daerah, serta pengaruh negatif tipe pemerintahan kabupaten terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi kegunaan bagi :

1. Pihak pemerintah daerah, yaitu kepala daerah dan perangkatnya. Diharapkan dapat memacu pihak pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan melakukan pelaporan keuangan di internet secara sukarela. Contohnya, dengan mengetahui bahwa karakteristik yang dimiliki oleh suatu pemerintahan daerah merupakan faktor yang mempengaruhi secara positif praktik untuk melakukan pelaporan keuangan di internet secara sukarela, namun pemerintahan daerah tersebut belum melakukan pelaporan keuangan di internet secara sukarela, maka pemerintahan daerah tersebut akan berusaha melakukan pelaporan keuangan di internet secara sukarela.
2. Pemakai laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya investor, kreditur, dan donatur, dalam hal pertimbangan mengambil keputusan melakukan kerjasama di bidang keuangan atau tidak dengan suatu pemerintahan daerah. Contohnya, dengan mengetahui bahwa semakin besar kekayaan suatu pemerintahan daerah, maka semakin besar kecenderungan pemerintahan

daerah tersebut untuk melakukan pelaporan keuangan di internet secara sukarela. Hal ini dapat membantu investor, kreditur, dan donatur mendapatkan informasi keuangan dan melakukan pengawasan sehingga dapat dipertimbangkan untuk melakukan kerjasama keuangan.

3. Peneliti lain, dalam hal menjadi masukan, referensi kajian-kajian empiris, serta dapat memberikan pengetahuan dan wawasan, untuk penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor penentu pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan usulan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi latar belakang yang mendasari munculnya permasalahan dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Telaah Pustaka

Bab telaah pustaka membahas tentang teori-teori yang melandasi penelitian ini dan dasar acuan teori yang digunakan dalam analisis pada penelitian ini. Bagian ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Bab metode penelitian berisi variabel penelitian, definisi operasional penelitian, populasi dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV : Hasil dan Analisis

Bab hasil dan penelitian menguraikan tentang deskripsi obyek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

Bab V : Penutup

Bab penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil dari analisis data serta masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Pemerintahan Daerah di Indonesia

Sesuai UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kota dan daerah kabupaten. Setiap daerah provinsi, daerah kota, dan daerah kabupaten mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya. Tiap pemerintahan daerah dipimpin oleh kepala daerah. Sebutan kepala daerah untuk pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, dan pemerintahan kabupaten,

masing-masing ialah gubernur, walikota, dan bupati. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14, kepala daerah berperan sebagai badan eksekutif, artinya kepala daerah menyusun dan menyampaikan anggaran untuk mendapatkan persetujuan, kemudian melaksanakannya sesuai ketentuan perundang-undangan setelah mendapatkan persetujuan. Ditegaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan langsung kepala daerah (pilkada). Prosedur dan mekanisme pemilihan kepala daerah sekarang ini, yakni semenjak UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan, lebih menggambarkan pelaksanaan demokrasi. Pilkada dilaksanakan secara langsung, terbuka kemungkinan bagi calon independen/nonparpol untuk maju melalui partai politik (parpol)/gabungan parpol, dan proses penyaringan bakal calon dilaksanakan secara terbuka dengan mewajibkan tiap parpol/gabungan parpol mengumunkan proses dan hasil penyaringan kepada masyarakat. Kewenangan politik yang dulu ada pada DPRD untuk memilih kepala daerah telah diserahkan pada rakyat sehingga rakyat dapat memilih kepala daerah secara langsung (Bastian, 2006).

Dewasa ini, Indonesia mulai menjalankan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan

pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi daerah berdampak pada perimbangan/pembagian keuangan pusat dan daerah.

Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

2.1.1.2 Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan merupakan suatu bentuk pengungkapan informasi keuangan. Pengungkapan berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan (Ghozali dan Chariri, 2007). Menurut Hendriksen dan Breda (2002) ada bukti yang menunjukkan bahwa entitas enggan menambah luasnya pengungkapan keuangan tanpa adanya tekanan dari profesi akuntansi atau pemerintah. Beberapa alasannya ialah pengungkapan dapat memberi manfaat kepada pesaing serta seringkali diyakini bahwa investor tidak dapat memahami kebijakan dan prosedur akuntansi.

Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara. FASB mengartikan pelaporan

keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian (*means of communication*) informasi tentang segala kondisi dan kinerja entitas terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui laporan keuangan (Suwardjono, 2010). Singkatnya, pelaporan keuangan lebih luas dari pada laporan keuangan (Bastian, 2006). Dengan demikian, pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi tentang keuangan pemerintahan daerah disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara.

Dalam penelitian yang dilakukan Yentifa, dkk (2010), dicantumkan bahwa informasi keuangan yang dibutuhkan berdasarkan riset terdahulu diantaranya ialah informasi kondisi keuangan, kinerja, perencanaan dan penganggaran. Setidaknya, informasi tersebut masing-masing dapat dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan rencana operasional keuangan pemerintahan daerah. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap pemerintahan daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Peraturan mengenai APBD ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Penyampaian LKPD oleh pemerintah daerah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31. Penyajian LKPD juga telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01

tentang penyajian laporan keuangan. Sedangkan ketentuan yang mengatur tentang LAKIP ialah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003, serta memperhatikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006.

Namun, dari semua peraturan tersebut tidak ada yang mengatur mengenai media yang digunakan untuk penyebaran informasi keuangan pemerintahan daerah yang dimaksud di atas. Pada bagian pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat sedikit bahasan tentang pelaporan keuangan pemerintah tetapi tidak ada ulasan mengenai media yang ditetapkan untuk pelaporan keuangan pemerintah. Meskipun begitu, pemerintah daerah dapat menyediakan informasi keuangan yang memang ingin disampaikan oleh karena pemerintah daerah sendiri menganggap bahwa informasi tersebut bermanfaat bagi pihak luar dan berkehendak untuk mengungkapkannya secara sukarela (*voluntary*), bukan karena untuk memenuhi tuntutan undang-undang, peraturan pemerintah, atau ketentuan lainnya. Bila suatu pemerintahan daerah melakukan pelaporan keuangan di internet, hal itu merupakan suatu bentuk pelaporan keuangan yang dilakukan secara sukarela.

2.1.1.2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, dijelaskan bahwa APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan

pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD.

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara menyebutkan fungsi-fungsi APBD, yaitu :

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan,
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan,
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian,
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,

6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Menurut Mardiasmo (2002), proses penyusunan anggaran mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik dalam proses pemroritasan
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja
4. Meningkatkan transparansi dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat luas.

2.1.1.2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Sesuai Pernyataan Nomor 1 Standar Akuntansi Pemerintahan tentang penyajian laporan keuangan, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam

membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian

yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:

a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realsasinya dalam satu periode pelaporan.

b) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintahan daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

c) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

d) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

2.1.1.2.3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 menginstruksikan kepada pemimpin instansi pemerintah, termasuk kepala daerah, untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. LAKIP berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban mengenai keberhasilan ataupun kegagalan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam rangka pencapaian visi dan misi serta agenda pembangunan daerah yang dijabarkan lagi melalui program-program pembangunan. Disamping itu, laporan ini juga memuat aspek penting bidang keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan yang tidak terpisah antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 merupakan pedoman penyusunan LAKIP. Dalam penelitian Solikin (2006) dijelaskan bahwa pada keputusan ini terdapat Rencana Strategis (Renstra) yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan cara mencapai sasaran tersebut

dalam bentuk uraian kebijakan dan program. Renstra meliputi waktu lima tahun. Kemudian setiap tahun akan dipilih kebijakan dan program yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan (Rencana Kerja Tahunan/RKT). Indikator kinerja yang dipakai ialah indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam LAKIP terdapat dua formulir untuk mengukur kinerja, yaitu formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja (PPS). Untuk menentukan kinerja kegiatan atau pencapaian sasaran digunakan cara perbandingan antara rencana (*target*) dengan realisasi, bagi setiap indikator kinerja.

LAKIP memiliki dua bagian akuntabilitas kinerja, yaitu akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas kinerja meliputi evaluasi dan analisis kinerja kegiatan serta evaluasi dan analisis pencapaian sasaran. Sedangkan akuntabilitas keuangan berisi alokasi dan sumber pembiayaan serta realisasi anggaran untuk membiayai program dan kegiatan, termasuk penjelasan tentang efisiensi.

Selain Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pembuatan LAKIP juga memperhatikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP diharapkan dapat memberikan informasi yang nyata terhadap kinerja yang telah diwujudkan oleh pemerintah daerah. Melalui

penyusunan LAKIP secara periodik juga dapat membantu *stakeholder* mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada pemerintah daerah. Selain itu, melalui laporan ini pula para pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi secara transparan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat.

2.1.1.3 Manfaat Pelaporan Keuangan di Internet

Menurut Styles dan Tennyson (2007), suatu cara yang mungkin paling nyaman dan *cost effective* bagi pihak pemerintahan untuk menyebarkan informasi di zaman sekarang adalah menggunakan internet. Peraturan menggunakan internet untuk menyebarkan laporan tahunan pemerintahan kepada masyarakat sudah menjadi perhatian *Governance Finance Officers Association (GFOA)* di Amerika Serikat. GFOA meyakini banyak manfaat dari publikasi dengan menggunakan internet, diantaranya :

1. Meningkatkan kepedulian terhadap dokumen. Pemerintahan daerah akan semakin peduli dengan dokumen-dokumen daerah karena sewaktu-waktu dokumen tersebut harus dapat dipublikasikan.
2. Meningkatkan pemakaian oleh *stakeholders*. Laporan keuangan pemerintah dan dokumen anggaran menyediakan sumber informasi yang penting bagi partisipasi *stakeholder* dalam proses penganggaran pemerintahan dan demonstrasi akuntabilitas keuangan (GFOA, 2003). Dengan begitu, dokumen-dokumen harus siap tersedia bagi beragam *stakeholder*. Internet menyediakan

kesempatan yang relatif mudah dan murah untuk menyediakan informasi keuangan bagi semua *stakeholder* (Lavigne, 2002 dalam Styles dan Tennyson 2007).

3. Merupakan alat analisis yang lebih mudah untuk diaplikasikan. Informasi keuangan yang disediakan pada suatu website dalam format elektronik seperti berkas kertas kerja (*spreadsheet*) atau *eXtensible Financial Reporting Markup Language* (XFRML) memungkinkan pengguna untuk lebih mudah dan lebih luas dalam menganalisis data keuangan (Lymer, dkk 1999; Trites 1999; FASB, 2000 dalam Styles dan Tennyson, 2007).
4. Mencegah kelebihan pengungkapan dan menghemat biaya publikasi. Styles dan Tennyson (2007) berpendapat bahwa informasi keuangan yang dipublikasikan secara elektronik dapat menjangkau lebih banyak pengguna namun tidak meningkatkan biaya cetak dan distribusi.

2.1.1.4 Teori Legitimasi

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkesinambungan mencari cara untuk meyakinkan bahwa organisasi tersebut beroperasi dalam batasan-batasan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, dengan begitu organisasi tersebut berusaha meyakinkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dipedulikan oleh pihak-pihak luar (Deegan, 2000). Legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (Asforth dan Gibs, 1990 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada

perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat (Ghozali dan Chariri, 2007).

Menurut Deegan (2000), teori legitimasi meyakini suatu gagasan bahwa terdapat "kontrak sosial" antara organisasi dengan lingkungan tempat organisasi beroperasi. Konsep "kontrak sosial" digunakan untuk menunjukkan harapan masyarakat tentang cara yang seharusnya dilakukan organisasi dalam melakukan aktivitas. Harapan masyarakat terhadap perilaku perusahaan dapat bersifat implisit dan eksplisit. Deegan (2000) menyatakan bahwa, bentuk eksplisit dari kontrak sosial adalah persyaratan legal, sementara bentuk implisitnya adalah harapan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan legal. Organisasi akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan organisasi untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerja organisasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat.

Demikian halnya dengan pemerintahan daerah. Dewasa ini, seiring adanya jaminan akan demokrasi pasca reformasi, masyarakat menjadi semakin kritis dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Nuswantoro (2010) menyebutkan keterbukaan informasi merupakan salah satu hal yang menjadi fokus perhatian masyarakat. Semangat reformasi di bidang keuangan dan reformasi berbagai aspek di berbagai lingkungan telah mendorong kepercayaan diri masyarakat untuk turut serta mengawasi kinerja pemerintah khususnya dalam pola pengelolaan keuangan. Bentuk perubahan tersebut antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola

keuangan. Dampaknya, suatu pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel sudah menjadi harapan masyarakat secara umum. Seiring harapan masyarakat yang berubah, pemerintah daerah juga harus dapat beradaptasi dan berubah. Pemerintah daerah dikatakan efektif apabila dapat bereaksi dengan cepat terhadap perubahan yang menjadi perhatian (Deegan, 2000).

Pemerintah daerah dapat memenuhi harapan masyarakat dengan melakukan pelaporan keuangan sukarela di internet. Pelaporan keuangan di internet secara sukarela merupakan suatu bentuk mengkomunikasikan informasi keuangan yang mengandung nilai akuntabilitas serta merupakan wujud transparansi atas pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah. Cara ini dianggap tepat mengingat menurut Dowling dan Preffer dalam Deegan (2000) strategi yang dapat dilakukan untuk melegitimasi aktivitas suatu organisasi ialah dengan strategi komunikasi. Ditambahkan lagi oleh Hurst (1970) dalam Deegan (2000) bahwa laporan akuntansi dapat menjadi alat melegitimasi keberadaan suatu organisasi.

Menurut Deegan (2000), organisasi harus beradaptasi dengan harapan masyarakat jika ingin sukses. Dengan memenuhi harapan masyarakat, aktivitas dan kinerja pemerintah daerah dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena telah diketahui bahwa pemenuhan harapan masyarakat berdampak baik terhadap organisasi, pemerintah daerah akan cenderung untuk melakukan pelaporan keuangan di internet secara sukarela dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

2.1.1.5 Teori Stakeholder

Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan *stakeholder* kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). Gray, Kouhi, dan Adams (1994) dalam Ghozali dan Chariri (2007) mengatakan bahwa

Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan itu harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah mencari dukungan tersebut. Makin *powerful stakeholder*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi.

Setiap *stakeholder* memiliki hak untuk disediakan informasi mengenai pengaruh *stakeholder* terhadap organisasi, sekalipun *stakeholder* memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut ataupun *stakeholder* tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap keberlangsungan organisasi (Deegan, 2000). Sehubungan dengan "hak atas informasi" itu, Gray, Owen, dan Adams (1996) dalam Deegan (2000) membuat *accountability model*, yang menganggap pelaporan (*reporting*) lebih sebagai wujud pertanggungjawaban dibanding wujud pemenuhan tuntutan. Dengan kata lain, tiap pihak dalam lingkungan organisasi memiliki hak untuk diinformasikan mengenai operasi organisasi.

Hal yang sama juga berlaku pada pemerintahan daerah. Pelaporan keuangan di internet secara sukarela dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi *stakeholder*. Pemerintah daerah dapat melakukan pelaporan keuangan di internet secara sukarela sebagai upaya mendapatkan dukungan dari *stakeholder*.

Apabila *stakeholder* mendukung pemerintahan daerah, maka aktivitas pemerintahan daerah dapat berjalan lebih baik.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk memeriksa pelaporan keuangan internet pada organisasi-organisasi laba, namun hanya ada sedikit penelitian dengan topik yang sama yang dilakukan di institusi pemerintahan (Laswad, dkk 2005 dan Styles dan Tennyson, 2007). Penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Desain Penelitian (Variabel & Metodologi Penelitian)	Hasil Penelitian	Saran untuk Penelitian Selanjutnya
Fawsi Laswad, Richard Fisher, Peter Oyelere (2005)	Memeriksa karakteristik pemerintah daerah yang mempengaruhi penyebaran sukarela laporan keuangan di internet	<u>Variabel Terikat</u> Pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah <u>Variabel Bebas</u> Kompetisi	1. <i>Leverage</i> , kekayaan pemerintahan daerah, visibilitas pers memiliki hubungan positif dengan praktik IFR. Tipe council berhubungan negatif dengan	Mengembangkan indeks pengungkapan di internet, tidak sebatas seperti yang diungkapkan dalam <i>hard copy</i> laporan keuangan.

		<p>politik, ukuran, <i>leverage</i>, kekayaan pemerintahan daerah, visibilitas pers, tipe <i>council</i></p> <p><u>Metode Penelitian</u></p> <p>Statistik deskriptif, analisis univariat, dan analisis regresi multivariate (regresi logistik)</p>	<p>praktik IFR.</p> <p>2. Hubungan positif antara praktik IFR dengan kompetisi politik dan ukuran, tidak didukung.</p>	
<p>Alan K. Stles dan Mack Tennyson (2007)</p>	<p>Memeriksa keberadaan dan aksesibilitas pelaporan keuangan pemerintah kota US di internet serta mengidentifikasi variabel yang berhubungan dengan praktik pelaporan keuangan pemerintah kota di internet.</p>	<p><u>Variabel Terikat</u></p> <p>Model 1 : Laporan keuangan tahunan komprehensif yang terdapat di internet</p> <p>Model 2 : Nilai indeks aksesibilitas</p> <p><u>Variabel Bebas</u></p> <p>Model 1 : ukuran, struktur pemerintahan, sertifikasi pelaporan,</p>	<p>1. Kota yang lebih besar memiliki kecenderungan melakukan pelaporan keuangan internet. Kota dengan pendapatan per kapita dan tingkat pengungkapan akuntansi yang lebih tinggi cenderung melakukan pelaporan keuangan di internet.</p> <p>2. Aksesibilitas</p>	<p>Menambahkan variabel keuangan dan non keuangan untuk mengembangkan model penentu pelaporan keuangan internet</p>

		<p>pendapatan.</p> <p>Model 2 : ukuran, struktur pemerintahan, sertifikasi pelaporan, pendapatan, kondisi keuangan kota, utang</p> <p><u>Metode Penelitian</u></p> <p>Statistik deskriptif, analisis univariat, dan analisis regresi multivariate (regresi logistik dan OLS).</p>	<p>data keuangan di internet secara positif berhubungan dengan jumlah penduduk, pendapatan perkapita penduduk, tingkat utang, posisi keuangan kota serta kualitas pelaporan keuangan.</p>	
--	--	--	---	--

2.2 Kerangka Pemikiran

Masyarakat memiliki harapan akan adanya suatu pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel, yang menandakan terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang baik. Beberapa sumber menyatakan manfaat dari internet apabila digunakan sebagai media pelaporan keuangan. Menurut Bertot, dkk (2010), penggunaan internet dapat menciptakan budaya transparansi yang juga akan mewujudkan akuntabilitas. Pengungkapan sukarela laporan keuangan pemerintah daerah di internet dinilai efisien (Woldenberg, 2004 dalam Bertot, dkk 2010) dan efektif meningkatkan pengendalian terhadap perangkat pemerintahan daerah dari tindakan korupsi serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah (Shim dan Eom, 2008 dalam Bertot, dkk 2010). Internet dinilai dapat menjadi jawaban atas harapan masyarakat akan terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Namun demikian, hanya ada beberapa pemerintah daerah yang secara sukarela memilih untuk mengambil manfaat dari internet sebagai media dalam melakukan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi pemerintahan daerah yang melakukan dan yang tidak melakukan pengungkapan pelaporan keuangan di internet secara sukarela serta mengetahui karakteristik-karakteristik tertentu yang mempengaruhi. Dengan demikian, dapat dianalisis alasan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan melakukan atau tidak melakukan pelaporan keuangan di internet secara sukarela berhubung internet dinilai dapat digunakan sebagai media efektif dan efisien dalam pelaporan

keuangan yang dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Penelitian ini menganalisis pengaruh kompetisi politik, ukuran pemerintahan daerah, *leverage*, kekayaan pemerintahan daerah, dan tipe pemerintahan daerah terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah. Semakin besar kompetisi politik suatu pemerintahan daerah maka akan semakin besar kecenderungan kepala daerah untuk menyediakan informasi (Baber, 1983 dalam Laswad, dkk 2005) karena akan menanggung biaya pengawasan yang lebih besar dari saingan politiknya. Salah satu cara penyediaan informasi yang dapat dilakukan ialah melalui internet.

Ukuran pemerintahan daerah juga mempengaruhi pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah secara positif karena semakin besar ukuran pemerintahan daerah menandakan jumlah dan transfer kekayaan yang dikelola oleh perangkat pemerintahan daerah semakin besar pula sehingga biaya pemantauan tinggi. Mengingat kebutuhan untuk pengungkapan yang lebih banyak oleh ukuran pemerintahan daerah yang besar, internet dapat menjadi sarana sangat efisien dan memuaskan bagi pemerintahan daerah berukuran besar (Ettredge, dkk 2002; Pirchegger dan Wagenhofer, 1999 dalam Laswad, dkk 2005).

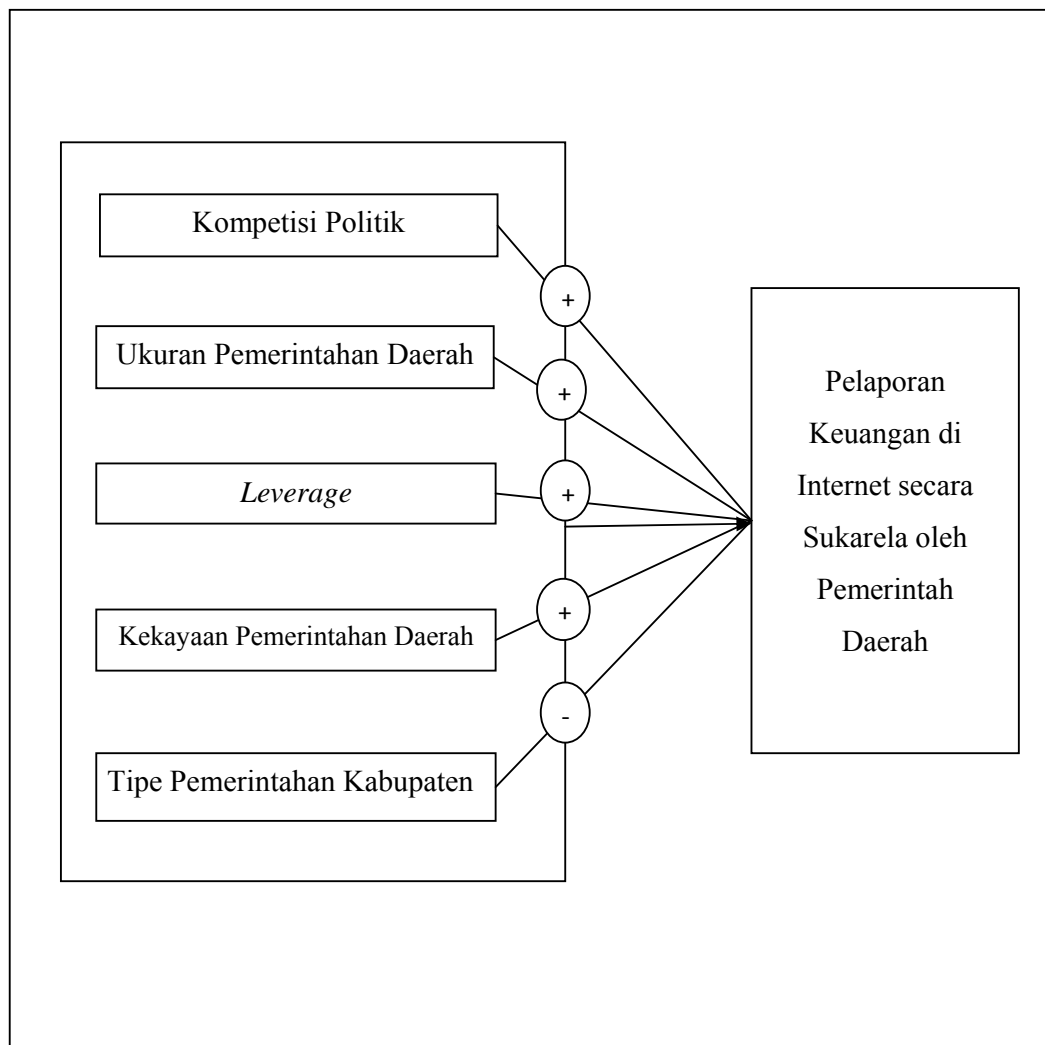
Lverage juga merupakan suatu faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi *leverage*, yang menunjukkan penggunaan utang, maka biaya utang pun makin tinggi sehingga kepala daerah memiliki kecenderungan untuk mengurangi biaya

utang. Hal tersebut dapat dicapai melalui pengungkapan informasi secara sukarela dengan menggunakan media internet (Laswad, dkk 2005).

Kekayaan pemerintahan daerah mempengaruhi pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah secara positif karena semakin besar kekayaan pemerintahan daerah menandakan bahwa manajemen pemerintahan daerah tersebut memiliki kualitas yang baik sehingga kepala daerah cenderung mempublikasikan hal tersebut. Hal itu dapat dijadikan peluang oleh kepala daerah untuk meningkatkan kesempatannya dipilih kembali dalam pemilihan selanjutnya (Christiaens, 1999 dalam Laswad, dkk 2005). Salah satu cara penerbitannya ialah dengan menyediakan pelaporan keuangan di internet.

Penduduk di pemerintahan kabupaten pada umumnya melakukan urbanisasi. Menurut Ingram (1984) dalam Laswad, dkk (2005), urbanisasi membantu pembentukan koalisi, yaitu gabungan pemilih individu, sehingga kepala daerah memiliki dorongan lebih besar untuk memberikan informasi guna pemantauan secara proporsional dengan wilayah metropolitan yang memiliki populasi penduduk yang besar dibanding dengan wilayah pedesaan yang memiliki jumlah penduduk relatif besar. Ditambah lagi, pemakaian dan akses internet di daerah tujuan urbanisasi lebih tinggi. Hal tersebut memungkinkan bahwa pelaporan keuangan di internet secara sukarela akan lebih banyak dipraktikkan di pemerintahan provinsi dan pemerintahan kota dibanding pemerintahan kabupaten. Dengan demikian, tipe pemerintahan kabupaten mempunyai pengaruh negatif terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah.

Dari uraian di atas, kerangka pemikiran mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah dapat digambarkan dalam suatu model berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kompetisi Politik terhadap Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah

Persaingan politik tingkat tinggi meningkatkan biaya dalam jangka panjang untuk para kepala daerah terpilih mengabaikan janji-janji sebelum pemilihan, dan memotivasi pemimpin sekarang (yang sedang memegang jabatan) setuju untuk menanggung biaya pengawasan (*monitoring cost*) yang lebih besar (Baber, 1983; Evans dan Patton, 1987 dalam Laswad, dkk 2005). Internet adalah mekanisme yang berbiaya efektif untuk penyebaran informasi kepada para pemilih dengan cepat dan simultan sehingga dapat menjadi media penting untuk pemakaian tambahan pemantauan kewajiban politisi.

Selanjutnya, Baber dan Sen (1984) dalam Laswad, dkk (2005) berpendapat bahwa persaingan politik membuat

" . . . incumbents more vulnerable to claims by political rivals of irresponsible management, and therefore increases incentives to engage in self-regulation—that is, to demonstrate a commitment to efficient management—by using accepted reporting. . . "

Ada bukti bahwa penggunaan internet untuk pelaporan keuangan dengan cepat akan menjadi norma di sektor swasta internasional. Securities and Exchange Commission (SEC) telah menyatakan bahwa karena investor memiliki akses lebih dan menggunakan internet, komisi akan mempertimbangkan mendorong penggunaan internet sebagai alat penyebaran utama (SEC, 2001). Dengan demikian, penggunaan sukarela dari web untuk pelaporan keuangan oleh beberapa

pemerintah daerah di Indonesia mungkin merupakan upaya untuk menunjukkan *self regulation* dalam bentuk kepatuhan terhadap praktik metode pelaporan terbaik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1: Kompetisi politik mempunyai pengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah.

2.3.2 Pengaruh Ukuran Pemerintahan Daerah terhadap Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah

Suatu pemerintahan daerah yang berukuran besar umumnya memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar. Jumlah dan besarnya transfer kekayaan yang diadministrasikan oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan persaingan untuk suatu jabatan publik (Baber, 1983 dalam Laswad, dkk 2005). Kompetisi politik yang tinggi memacu kepala daerah yang sedang memegang jabatan untuk tidak mengabaikan perjanjian sebelum pemilu dengan pemilih pendukung (atau kelompok yang berkepentingan), sehingga kepala daerah memiliki insentif untuk menanggung biaya pemantauan yang lebih besar dengan memberikan informasi lebih lanjut yang menunjukkan pelaksanaan janji sebelum pemilihan mereka (Baber, 1983 dalam Laswad, dkk 2005).

Mengingat kebutuhan untuk pengungkapan yang lebih besar oleh pemerintahan daerah yang besar, diharapkan pemerintahan daerah tersebut akan cenderung untuk mengadopsi berbagai metode pengungkapan. Internet cenderung menjadi sarana sangat efisien dan memuaskan bagi pemerintahan daerah yang

cakupan otoritasnya besar. Akibatnya, manfaat dari pengungkapan melalui internet cenderung akan meningkat dengan ukuran (Debreceeny, dkk 2002; Pirchegger dan Wagenhofer, 1999 dalam Laswad, dkk 2005).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H2: Ukuran pemerintahan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah.

2.3.3. Pengaruh *Leverage* terhadap Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah

Utang yang digunakan untuk membiayai kegiatan masyarakat menyediakan insentif bagi kepala daerah untuk mengurangi biaya utang (Zimmerman, 1977 dalam Laswad, dkk 2005). Hal tersebut dapat dicapai melalui pengungkapan informasi secara sukarela yang memfasilitasi pemantauan oleh kreditur (Zimmerman, 1977; Baber, 1983; Baber dan Sen, 1984; Ingram, 1984; Ingram dan DeJong, 1987; Christiaens, 1999; Gore, 2004 dalam Laswad, dkk 2005). Pengungkapan tambahan tersebut dapat berupa *hard copy* tradisional laporan keuangan dan media lainnya, seperti laporan keuangan internet.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H3 : *Leverage* mempunyai pengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah.

2.3.4. Pengaruh Kekayaan Pemerintahan Daerah terhadap Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah

Christiaens (1999) berpendapat bahwa kekayaan pemerintah daerah berhubungan positif dengan meningkatnya pengungkapan karena memberikan sinyal dari kualitas kepala daerah, dimana kepala daerah dapat mengambil manfaat dengan meningkatkan kesempatan mereka dipilih kembali dan mengurangi biaya kepentingan. Christiaens (1991), berikut Ingram (1984), menggunakan pendapatan pekapita sebagai proxy untuk kekayaan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dengan kekayaan yang lebih kecil menunjukkan kinerja pemerintahan daerah yang kurang baik. Hal itu dapat memacu penghindaran penggunaan teknik pengungkapan sukarela, seperti pelaporan keuangan internet. Pemerintahan daerah seperti itu lebih suka untuk "...membatasi akses informasi akuntansi kepada pengguna" (Craven dan Marston, 1999 dalam Laswad, dkk 2005).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H4 : Kekayaan pemerintahan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah.

2.3.5. Pengaruh Tipe Pemerintahan Daerah terhadap Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah

Pemilih individu memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengawasi perilaku kepala daerah dan perangkatnya dibandingkan dengan koalisi pemilih, yaitu kumpulan pemilih individu, yang memiliki kemampuan lebih besar untuk melakukan pengawasan karena potensi mereka dalam mempengaruhi hasil pemilihan kepala daerah yang dilakukan melalui *voting* (Baber, 1983 dan Ingram, 1984 dalam Laswad, dkk 2005). Macam-macam koalisi pemilih ialah koalisi partai politik, pekerjaan, dan lainnya. Kepala daerah akan berusaha mengakomodasi pengawasan yang dilakukan koalisi pemilih dengan cara menyediakan informasi yang berguna dalam pemantauan dari tindakan kepala daerah.

Menurut Ingram (1984) dalam Laswad, dkk (2005), urbanisasi membantu pembentukan koalisi. Dengan demikian, kepala daerah memiliki dorongan yang lebih besar untuk secara sukarela memberikan informasi guna pemantauan secara proporsional dengan wilayah metropolitan yang memiliki populasi penduduk yang besar dibanding dengan wilayah pedesaan yang memiliki jumlah penduduk relatif besar. Wilayah metropolitan merupakan daerah tujuan urbanisasi yang memiliki penduduk lebih heterogen, baik dari sisi pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, diketahui bahwa tipe pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, dan pemerintahan kabupaten, memiliki komposisi penduduk yang berbeda. Penduduk di pemerintahan kabupaten umumnya melakukan urbanisasi sehingga komposisi penduduk di pemerintahan kabupaten lebih homogen dibandingkan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kota.

Ditambah lagi, berdasarkan Laporan Kesenjangan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi di Amerika (Juli, 1999) yang dikeluarkan oleh Administrasi Informasi dan Telekomunikasi Nasional setempat, yang dikutip dalam Laswad dkk, (2005), didapat fakta bahwa pemakaian dan akses internet di daerah tujuan urbanisasi lebih tinggi. Hal tersebut memungkinkan bahwa pelaporan keuangan di internet secara sukarela akan lebih banyak dipraktikkan di pemerintahan provinsi dan pemerintahan kota dibanding pemerintahan kabupaten.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H5 : Tipe pemerintahan kabupaten mempunyai pengaruh negatif terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Penelitian

3.1.1.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Melalui analisis terhadap variabel terikat adalah mungkin untuk menemukan jawaban atas suatu masalah (Sekaran, 2006). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah.

3.1.1.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat secara positif atau negatif (Sekaran, 2006). Apabila setiap unit kenaikan variabel bebas diikuti oleh kenaikan variabel terikat maka variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara positif. Demikian juga sebaliknya, apabila setiap unit penurunan variabel bebas diikuti oleh penurunan variabel terikat maka variabel bebas mempengaruhi secara negatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kompetisi politik, ukuran pemerintahan daerah, *leverage*, kekayaan pemerintahan daerah, dan tipe pemerintahan daerah.

3.1.2 Definisi Operasional

3.1.2.1 Kompetisi Politik (POLCOMP)

Kompetisi politik menunjukkan gambaran seberapa besar persaingan antara kepala daerah yang menjabat saat ini (*incumbent*) dengan saingan-saingan politiknya. Dalam penelitian Laswad, dkk (2005) yang dilakukan di Selandia Baru, kompetisi politik diukur dari perbandingan antara jumlah kandidat kepala daerah dengan posisi yang tersedia. Penelitian ini menilai kompetisi politik dengan menggunakan pengukuran yang sama dengan pengukuran dalam penelitian Laswad, dkk (2005) namun disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, yaitu hanya ada satu posisi sebagai kepala daerah dan hanya dijabat oleh satu orang. Kompetisi politik diukur dari jumlah kandidat kepala daerah pada pemilihan kepala daerah yang terakhir kali dilaksanakan di daerah tersebut sampai dengan penelitian ini dilakukan.

3.1.2.2 Ukuran Pemerintahan Daerah (SIZE)

Ukuran pemerintahan daerah menunjukkan besar kecilnya pemerintahan daerah. Sesuai dengan pengukuran dalam penelitian Laswad, dkk (2005), ukuran pemerintahan daerah dalam penelitian ini dinilai dari total aset. Dengan demikian, ukuran pemerintahan daerah menggambarkan besar kecilnya pemerintahan daerah yang dapat dilihat dari total aset yang dimiliki.

3.1.2.3 Leverage (LEV)

Leverage mengindikasikan sejauh mana dana yang dipinjam digunakan untuk mendanai aset yang dimiliki oleh pemerintahan daerah. Mengacu pada penelitian Laswad, dkk (2005), *leverage* yang digunakan dalam penelitian ini dinilai dari perbandingan antara utang jangka panjang dengan total aset. Rumusnya ialah :

$$\text{Leverage} = \text{long term liabilities} / \text{total assets}$$

3.1.2.4 Kekayaan Pemerintahan Daerah (WEALTH)

Kekayaan pemerintahan daerah menggambarkan tingkat kemakmuran daerah tersebut. Semakin tinggi angka kekayaan pemerintahan daerah, maka secara ekonomi telah terjadi peningkatan kemakmuran daerah tersebut. Kekayaan pemerintahan daerah diukur dari pendapatan perkapita (Laswad, dkk 2005). Pendapatan perkapita yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita. Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut.

3.1.2.5 Tipe Pemerintahan Daerah (COUNTYPE)

Tipe pemerintahan daerah didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah di Indonesia terbagi atas tiga bagian, yaitu pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, dan pemerintahan kabupaten. Mengacu pada penelitian Laswad, dkk (2005), variabel ini merupakan variabel *dummy*, yaitu

memberi nilai 0 untuk pemerintahan kota serta pemerintahan provinsi dan nilai 1 untuk pemerintahan kabupaten.

3.1.2.6 Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah adalah pemberian informasi keuangan melalui media internet yang dilakukan oleh pemerintah daerah sekalipun tidak diwajibkan dalam suatu peraturan. Sesuai dengan penelitian Laswad, dkk (2005), variabel *dummy* digunakan dalam pengukuran variabel pelaporan keuangan di internet secara sukarela. Pelaporan keuangan di internet secara sukarela dinilai dari ada tidaknya APBD, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), atau LAKIP pada situs resmi pemerintahan daerah. LKPD sendiri terdiri dari empat komponen, yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Salah satu dari komponen LKPD tersebut terdapat dalam situs resmi pemerintahan daerah, maka pemerintahan daerah tergolong mengungkapkan LKPD. Bila salah satu dari bagian pelaporan keuangan tersebut terdapat pada situs resmi pemerintahan daerah diberi nilai 1 sedangkan bila bagian pelaporan keuangan tidak terdapat pada situs resmi pemerintahan daerah diberi nilai 0.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah pemerintahan daerah di Indonesia, yaitu pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, dan pemerintahan kabupaten. Jumlah pemerintah daerah di Indonesia ialah sebanyak 33 pemerintahan provinsi, 98 pemerintahan kota, dan 399 pemerintahan kabupaten. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sampel bertujuan (*purposive sampling*) dengan tipe sampel kuota (*quota sampling*). Tujuannya ialah memastikan bahwa kelompok tertentu secara memadai terwakili dalam penelitian dengan menggunakan kuota setelah sebelumnya sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti.

Kriteria yang ditetapkan ialah :

1. Pemerintahan daerah telah memiliki laporan keuangan *audited* oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tahun 2009 serta laporan keuangan tersebut dapat diperoleh di BPK
2. Pemerintahan daerah memiliki situs resmi di internet
3. Data pemerintahan daerah berupa jumlah kandidat kepala daerah dapat diperoleh di Komisi Pemilihan Umum.

Sampling adalah proses pengambilan sebagian elemen dari suatu populasi sebagai wakil dari populasi tersebut. Besaran sampel yang tepat untuk penelitian adalah lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 (Sekaran, 2006).

Penghitungan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan formula perhitungan Slovin, yang dikemukakan Yamane (1973) dalam Supramono (2004), dengan menggunakan nilai kelonggaran (e^2) sebesar 10%.

Formulanya ialah :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan :

- n : jumlah sampel
N : jumlah populasi
 e^2 : nilai kelonggaran ketidaktelitian

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, melalui media perantara. Data sekunder tersebut berupa laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2009 pada yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Periode data yang digunakan pada penelitian ini hanyalah satu tahun, yaitu tahun 2009. Hal ini didasari dengan pertimbangan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang terbaru dan terlengkap yang dimiliki BPK pada saat penelitian ini dilakukan ialah periode tahun 2009.

Data variabel dependen, yaitu ada tidaknya pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah, diperoleh dengan mengamati langsung pada situs resmi pemerintah daerah. Alamat situs resmi pemerintah daerah didapatkan dari situs Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (www.depdagri.go.id) atau dari www.elocalgovernment.com.

Untuk data non keuangan, seperti data untuk variabel kompetisi politik diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum. Data berupa pendapatan perkapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi dokumentasi. Data-data dan teori dalam penelitian ini diperoleh dari literatur, artikel, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan landasan teori. Data juga diperoleh dari studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder baik dari lembaga yang mengeluarkan data tersebut maupun dari internet.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menghasilkan gambaran dari data yang telah terkumpul. Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, dan standar deviasi.

3.5.2 Uji Hipotesis

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini ialah regresi logistik (*Logistic Regression*). Regresi logistik digunakan untuk menguji dapat atau tidaknya suatu probabilitas terikat diprediksi dengan variabel bebasnya (Ghozali, 2006). Regresi logistik tidak memerlukan uji normalitas,

heteroskedasitas, dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya. Regresi logistik dipilih karena penelitian ini memiliki variabel dependen yang *dichotomous* dan variabel independen yang bersifat kombinasi antara metrik dan non-metrik (nominal). Variabel non-metrik merupakan variabel yang diukur dengan skala pengukuran kategori atau kelompok dari suatu subyek (Ghozali, 2006).

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel *dichotomous*. Pemerintah daerah yang melakukan pelaporan keuangan sukarela di internet dikategorikan ke dalam kode IFRA (*Internet Financial Reporting Local Authorities*) sedangkan pemerintah daerah yang memiliki situs resmi tetapi memilih untuk tidak menggunakannya untuk melakukan pelaporan dikategorikan N-IFRA (*Non-Internet Financial Reporting Local Authorities*).

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, model regresi logistik yang digunakan ialah :

$$\text{IFR} = \alpha + \beta_1 \text{Political Competition} + \beta_2 \text{Size} + \beta_3 \text{Leverage} + \beta_4 \text{Municipal Wealth} + \beta_5 \text{Council Type} + \mu_i \quad (3.1)$$

Dimana:

IFR = Variabel *dummy* praktik pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet (nilai 1 untuk kategori IFRA dan nilai 0 untuk kategori N-IFRA)

α = Konstanta

Political competition = Kompetisi politik

Size = Ukuran pemerintahan daerah

Leverage	=	<i>Leverage</i>
Municipal wealth	=	Kekayaan pemerintahan daerah
Council type	=	Variabel <i>dummy</i> tipe pemerintahan daerah (kode 1 untuk pemerintah kabupaten, 0 untuk lingkup pemerintahan daerah lainnya)
μ	=	Error

Selanjutnya, analisis pengujian model regresi logistik perlu memperhatikan hal-hal berikut :

1. Menilai Kelayakan Model Regresi

Regresi logistik merupakan suatu bentuk model regresi yang dimodifikasi. Karakteristik regresi logistik sudah tidak sama lagi dengan model regresi sederhana atau berganda. Dengan begitu, penentuan signifikansi secara statistik regresi logistik berbeda dengan regresi berganda. Kesesuaian model (*goodness of fit*) pada model regresi sederhana atau berganda dapat dilihat dari R^2 atau pun F test, sedangkan penilaian model pada regresi logistik dapat dilihat dari pengujian *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Pengujian ini dilakukan untuk menilai model yang dihipotesiskan agar data empiris cocok atau sesuai dengan model. Jika nilai statistik *chi square* pada *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak, sedangkan jika nilainya lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak, berarti model mampu memprediksi nilai

observasinya atau dengan kata lain model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2006).

H_0 : Tidak terdapat perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

H_A : Terdapat perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

2. Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Untuk menilai keseluruhan model (*overall model fit*) ditunjukkan dengan -2 *Log likelihood value* (nilai $-2LL$). Caranya ialah dengan membandingkan antara nilai $-2LL$ pada saat *Block Number* = 0, dimana model hanya memasukkan konstanta dengan nilai $-2LL$, dengan pada saat *Block Number* = 1, dimana model memasukkan konstanta dan variabel bebas. Apabila nilai $-2LL$ *Block Number* = 0 > nilai $-2LL$ *Block Number* = 1, maka menunjukkan model regresi yang baik. *Log likelihood* pada regresi logistik mirip dengan pengertian “*Sum of Square Error*” pada model regresi, sehingga penurunan *log likelihood* menunjukkan model yang semakin baik.

3. Menguji koefisien regresi

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Koefisien regresi dapat ditentukan dengan membandingkan nilai probabilitas (sig.) dengan tingkat signifikansi (α), sebesar 0,05. Jika nilai

probabilitas (sig.) > tingkat signifikansi (α), maka H_A alternatif ditolak atau hipotesis yang menyatakan variable bebas berpengaruh terhadap variabel terikat ditolak. Begitu juga sebaliknya, jika nilai probabilitas (sig.) < tingkat signifikansi (α), hal ini berarti H_A alternatif diterima atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat diterima.